



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

“MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI”

Oleh:

**Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
Anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi**

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI**

Perkembangan Peradilan Konstitusi



**Mahkamah Agung
Amerika Serikat
Marbury v Madison
(1803)**



**Mahkamah
Konstitusi Austria
(1920)**



**Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia
(2003)**

Model *Judicial Review*

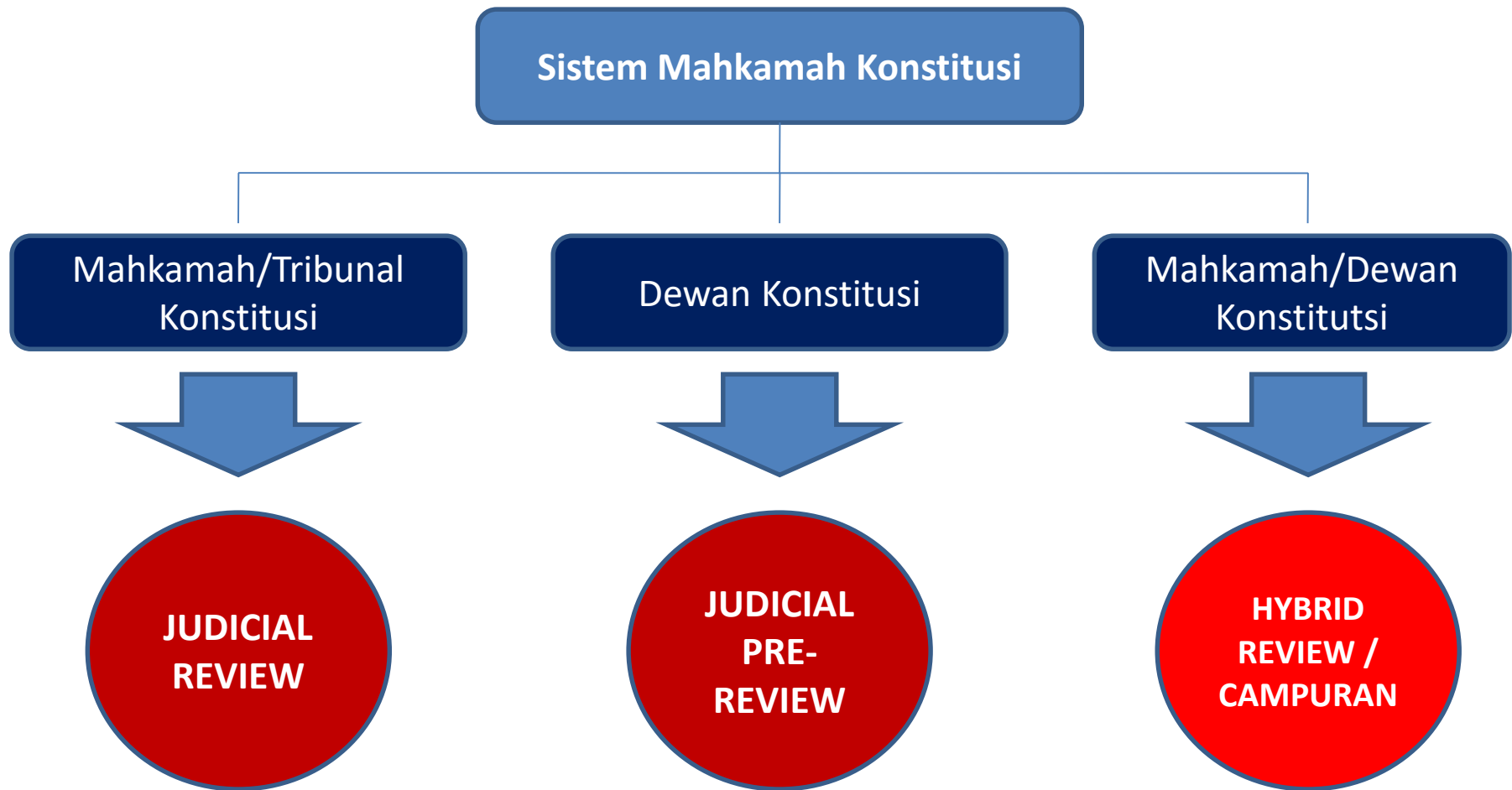
Sistem Terdesentralisasi / Sistem Amerika

- Terdesentralisasi di MA dan Pengadilan di bawahnya.
- Amerika Serikat, Canada, Australia, Filipina, India, Filipina, dsb.

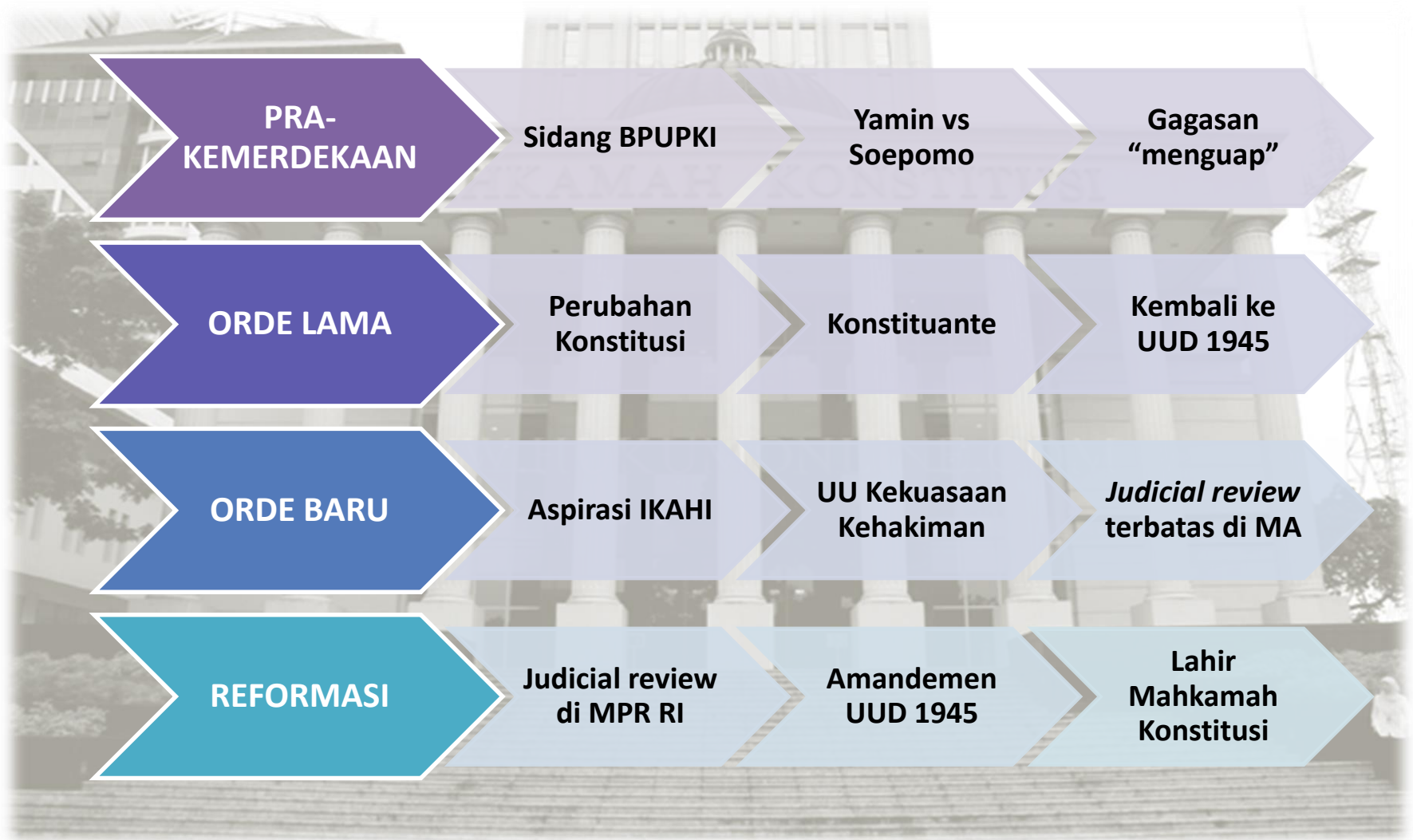
Sistem Terpusat / Sistem Eropa / Sistem Kelsenian

- Terpusat di Mahkamah Konstitusi
- Jerman, Austria, Turki, Korea Selatan, Afrika Selatan, Thailand, **INDONESIA**, dsb.

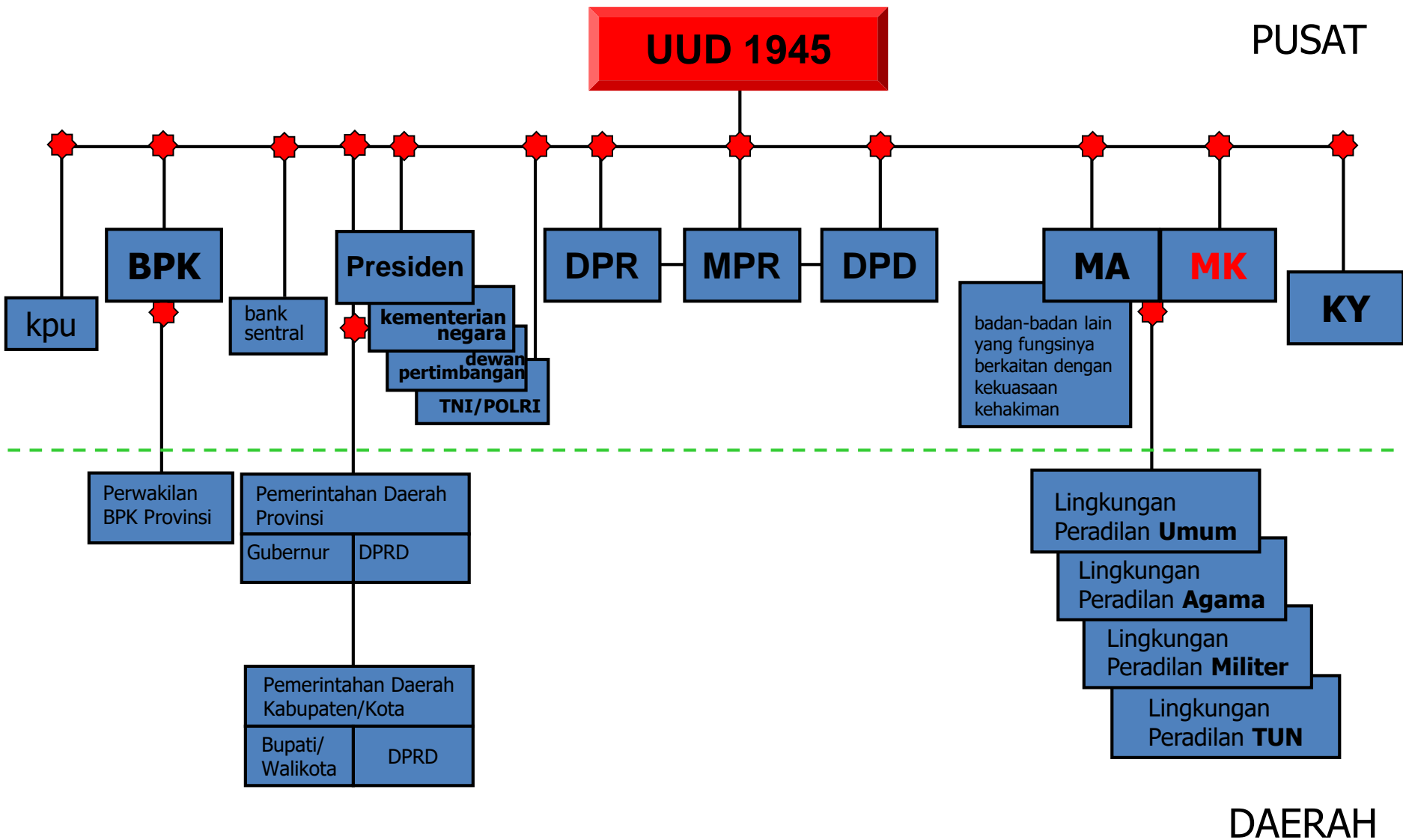
Model Mahkamah Konstitusi



Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- **Menguji UU terhadap UUD 1945**

2

- Memutus SKLN yang Kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

3

- **Memutus Pembubaran Partai Politik**

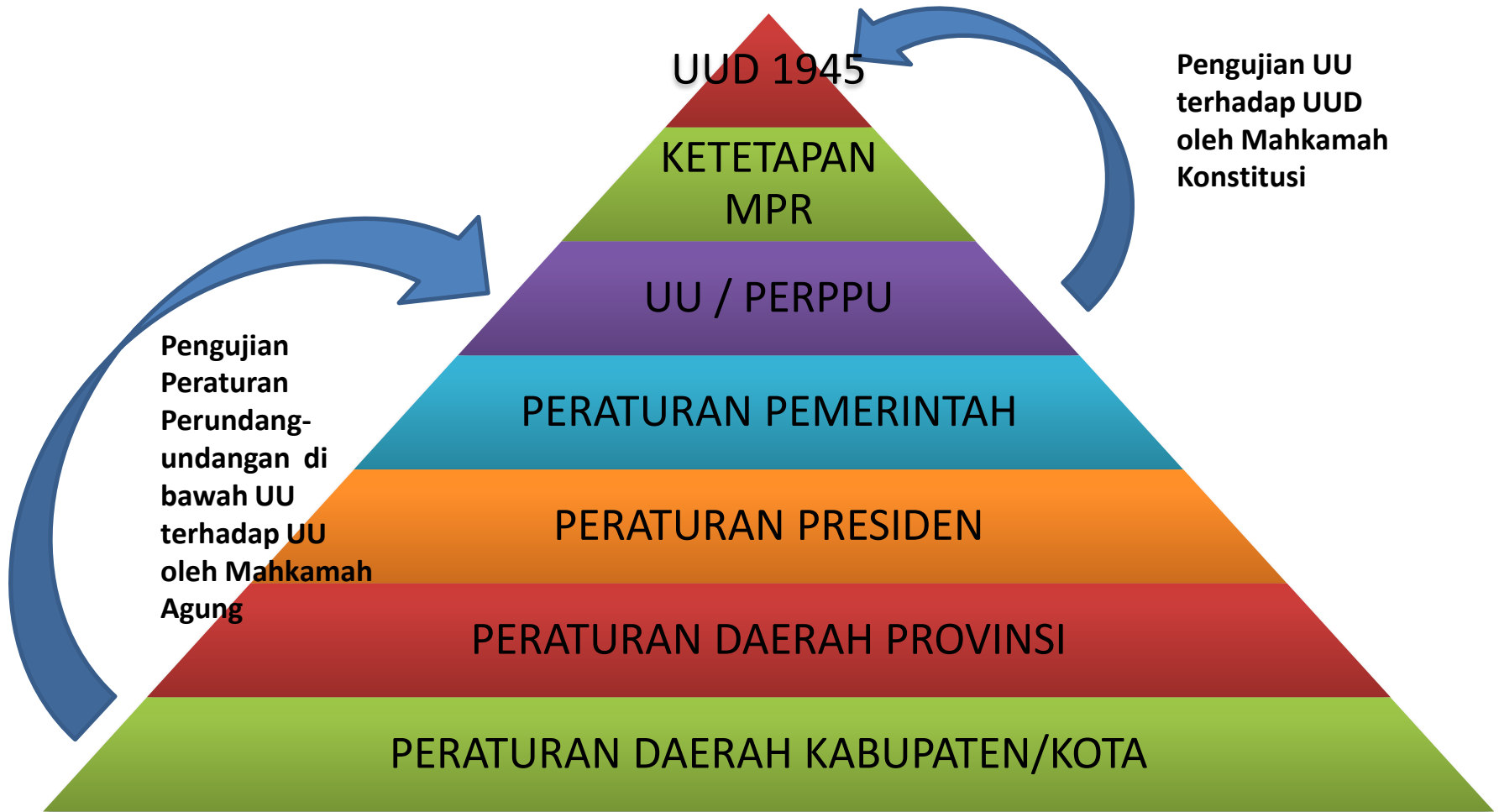
4

- **Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Supremasi Konstitusi di Indonesia



Fungsi Mahkamah Konstitusi



The Guardian of the Constitution, Ideology, and Democracy



The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights



The Final Interpreter of the Constitution

Hakim Konstitusi

- Hakim Konstitusi berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh tiga cabang kekuasaan berbeda.
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Presiden
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Mahkamah Agung



Pemohon dalam Pengujian UU

1. Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.



Pemohon Sengketa Hasil Pemilu di MK

1. **PILPRES:** Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. **PILEG:**
 - DPR/DPRD: Partai Politik Peserta Pemilu
 - DPD: Perseorangan Calon Anggota DPD
3. **PILKADA:**
 - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pemantau Pemilu Terakreditasi (apabila calon tunggal)



Rekapitulasi Putusan MK (Januari 2019)

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Putusan Sela	Gugur
PUU	1.209	259	420	384	116	-	21
SKLN	25	1	3	17	4	-	-
Pemilu Legislatif	1.826 (kasus)	120	1.224	400	44	38	
Pemilu Presiden	4	-	4	-	-	-	-
Pemilu Kepala Daerah	982	76	474	400	27		5
Pembubaran Parpol	-	-	-	-	-	-	-
<i>Impeachment</i>	-	-	-	-	-	-	-

Contoh-Contoh Putusan MK

- Putusan-Putusan MK terkait bidang:
 - **Pendidikan:** Anggaran Pendidikan, BPH, dsb.
 - **Energi dan Mineral:** SDA, Ketenagalistrikan, dsb.
 - **Agama:** Pengadilan Agama, Perkawinan, identitas kepercayaan, dsb.
 - **Hak Asasi Manusia:** Kebebasan berpendapat, ekspresi, uang pensiun, uang pesangon, dsb.
 - **Hukum:** Pendidikan Advokat, Pengujian Perda, Praperadilan, Peninjauan Kembali, Perzinaan, dsb.
- **Pemilu: ...**



Contoh-Contoh Putusan MK

- Putusan-Putusan MK terkait **PEMILU**:
 - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
 - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
 - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Parliamentary Threshold*)
 - Ambang Batas pengajuan Capres (*Presidential Threshold*)
 - Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
 - Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Legislatif
 - Solusi terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah
 - Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
 - Syarat menjadi anggota KPU
 - Pelaksanaan Pemilu Serentak
 - Syarat Calon Anggota DPD
 - dsb.



Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Kasus	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Sela
2004	23	252	38	131	74	9	-
2009	42	627	68	398	107	27	16
2014	14	869	9	647	195	6	12

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2

TERIMA KASIH



Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.

Anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2018 s.d. 2021

- **Anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi (2018 s.d. 2021)**
- **Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (2010 s.d. 2013)**
- **Hakim Mahkamah Konstitusi (2008 s.d. 2013)**
- **Ketua Badan Kerjasama Pusat Kajian Agraria (2008).**
- **Rektor Universitas Islam Malang (2002 s.d. 2006)**
- **Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Brawijaya (2000)**
- **Ketua Program Studi Magister Hukum FH Universitas Brawijaya (1997)**
- **Pembantu Dekan I FH Universitas Brawijaya (1979 s.d. 1983)**